

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 90.
- Andi Pangerang Moenta dkk, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok.
- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Peizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dendy Sugono, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta
- Hadari Nawawi, 1989, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Erlangga
- H.M. Arba., 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Malang.
- I Kentut Rochineng, 2017, "Kewewenangan Pengaturan Retribusi Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Di Daerah Provinsi Bali", Disertai Ilmu Hukum Universitas Undayana.
- Juniarso Ridwan, 2019. Achmad Sodit Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bayumedia Sakti Group,
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta PT Raja Grafinda Persada.
- Rudianto Ekawan, *Memaknai Kedaulatan Negara Atas Bahan Tambang*, Media Penilai Internal media Internal Edisi ke-7.
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press

Soemitro Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Sunindhia Y. W dan Nanik Widiyant, 1998, *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina aksara, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Tita Shabrina Maulinda, 2018, "Kajian Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Inflasi, Suku Bunga SBI, Indeks Dow Jones Dan Indeks Nikkei 225 Terhadap Indeks Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)" *Jurnal Manajemen*. Vol 6 No 3.

Sufriadi, 2014, Tangung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol.1.

Dendy Gandra, 2020, Kewewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol.2 No.3.

Muhammad Akib, 2000, Penegakan Hukum Lingkungan, Loc. Cit., Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya: Unair.

Natalia Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Studi Dokumen* No 2 Vol. XIII, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang Telah diubah Oleh Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Juga diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha Di Bidang Mineral dan Batu Bara

Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

D.Internet

Badan Pusat StatistikPertambangan

<https://www.bps.go.id/indicator/10/510/1/volume-produksi-pertambangan-bahan-galian.html> Diakses pada 11 September 2023 Pukul 00.24 WIB

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/tentang-sumatera-barat> Diakses pada tanggal 11 september 2023 Pukul 00.46 WIB

<https://news.republika.co.id/berita/rulp31430/dua-pelaku-tambang-tanah-ilegal-ditangkap-di-pekanbaru> Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01.27 WIB

<https://sumbarkita.id/gara-gara-tanah-dua-warga-pariaman-ditangkap/> Diakses .pada 11 September Pukul 01.29 WIB

<https://www.kaltimprov.go.id/berita/benny-harapannya-delegasi-juga-kewenangan-izin-pertambangan-batu-bara> Diakses tanggal 21 Maret,Pukul 23:55 WIB

<https://www.bkpm.go.id/> *Kategori C,Pertambangan dan Penggalian,21* Maret 2024,Pukul 17.15 WIB

[Website](https://esdm.sumbarprov.go.id/details/pages/2#) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat <https://esdm.sumbarprov.go.id/details/pages/2#> Diakses pada 16 Maret 2024

